

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan, solvabilitas dan ukuran pemerintah terhadap *financial distress* pemerintah daerah . Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Pada hasil regresi tersebut kemandirian keuangan memiliki arah positif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kemandirian daerah yang diukur dari PAD nya akan meningkatkan belanja modal sehingga nilai *financial distress* meningkat. Belanja modal tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Semakin besar pemerintah daerah menginvestasikan dananya untuk infrastruktur dan pelayanan publik maka akan mengurangi potensi daerah terkena *financial distress*. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang besar berarti memiliki ketersediaan dana yang cukup berupa pendapatan asli daerahnya sendiri untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah penggunaan utang untuk kelangsungan kegiatan pemerintahan masih sangat rendah. Rata-rata rasio solvabilitas yang dilihat dari utang dibagi ekuitas pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu 0,59%. Angka tersebut menunjukkan bahwa komponen utang lebih kecil dari ekuitasnya sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kesulitan dalam melunasi utangnya karena memiliki ekuitas dana yang sangat cukup. Penggunaan utang yang sangat kecil tidak berdampak pada alokasi belanja modal infrastruktur. Dengan kata lain tidak menambah atau mengurangi belanja modal. Berbeda apabila pemerintah memiliki utang yang besar maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menekan anggaran belanja. Oleh karena itu, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah.
3. Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Pada hasil regresi tersebut ukuran pemerintah memiliki arah positif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah maka akan semakin meningkat belanja modal yang akan digunakan untuk pelayanan publik. Dengan demikian potensi pemerintah daerah terkena *financial distress* semakin kecil. Pemerintah daerah yang berukuran lebih besar memiliki ketersediaan dana yang cukup sehingga tidak mengalami kesulitan dalam membiayai program pelayanan publik.

## B. Implikasi

Adapun implikasi dari penelitian yang diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dan arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa implikasi dari penelitian ini:

1. Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mandiri sebuah daerah maka akan meningkatkan belanja modal daerah tersebut sehingga potensi terkena *financial distress* rendah. Namun dalam penelitian ini pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rasio kemandirian yang kecil. Oleh karena itu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menggali potensi PAD agar tingkat kemandirian meningkat, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki kemandirian dibawah 25%. Hal ini perlu dilakukan mengingat kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress*. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah seperti meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penjualan jasa publik.
2. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Tidak berpengaruhnya solvabilitas terhadap *financial distress* dikarenakan penggunaan utang di Provinsi Jawa Tengah sangat kecil. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio solvabilitas yang dilihat dari utang dibagi ekuitas pada Provinsi Jawa Tengah yaitu 0,59%. Dengan demikian maka jumlah ekuitas dana pemerintah daerah lebih besar dibanding utangnya. Komponen

ekuitas terbesar yang dimiliki pemerintah daerah berasal dari ekuitas dana investasi. Selain itu pemerintah daerah lebih banyak menggunakan SiLPA yang merupakan salah satu komponen ekuitas dana lancar untuk menutupi defisit anggaran dibandingkan dengan melakukan pinjaman daerah. Hal inilah yang membuat komponen utang pada Provinsi Jawa Tengah sangat kecil.

3. Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan meningkatkan belanja modal sehingga potensi terkena *financial distress* akan semakin kecil. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan asetnya karena pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil sehingga pemerintah daerah tersebut memiliki resiko terkena *financial distress* yang rendah. Peningkatan aset dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi daerah pada perusahaan BUMD serta meningkatkan investasi pada aset tetap seperti pembelian tanah, bangunan dan lain-lain.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Kurangnya penelitian terdahulu yang relevan yang membahas dan meneliti tentang fenomena *financial distress* pemerintah daerah di

Indonesia sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mencari lebih banyak referensi dari jurnal luar negeri.

2. Sampel dalam penelitian ini hanya pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel tidak hanya di daerah Jawa saja namun seluruh Indonesia dengan rentang waktu yang lebih panjang agar lebih mengetahui kondisi *financial distress* yang terjadi di pemerintah daerah Indonesia
3. Penelitian ini menggunakan satu proksi untuk mengukur *financial distress* pada pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan belanja modal. Menurut Ncube dan Vacu (2013) terdapat beberapa proksi lain yang dapat digunakan untuk mengukur *financial distress* seperti kas untuk belanja operasi, saldo kas negative, pertumbuhan utang, dan lain lain.
4. Variabel independen dalam penelitian ini hanya 3 yaitu kemandirian keuangan, solvabilitas, dan ukuran pemerintah sehingga diharapkan penelitian selanjutnya menambah dan mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah